



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.614, 2016

KEMENKO-PEREKONOMIAN. Peta Jalan. Tahun
2016-2019.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, perlu disusun dan ditetapkan peta jalan (*road map*) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan langkah-langkah nyata memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
 6. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016-2019.

Pasal 1

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016-2019 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Pasal 2

Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan melalui program:

- a. **Manajemen Perubahan;**
- b. **Penguatan Pengawasan;**
- c. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja;**
- d. **Penguatan Kelembagaan;**
- e. **Penataan Tata Laksana;**
- f. **Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;**
- g. **Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;**
- h. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan**
- i. *Quick Wins.*

Pasal 3

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016 - 2019.

Pasal 4

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

INDIKATOR KINERJA BIDANG PEREKONOMIAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016-2019

INDIKATOR KINERJA BIDANG PEREKONOMIAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TAHUN 2016-2019

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
1. Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi / Tim Manajemen Perubahan / Agen-agen Perubahan	Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi / Tim Manajemen Perubahan / Agen-agen Perubahan	Terhangurnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan	Biro Perencanaan	
	2. Pelaksanaan dan Monev Reformasi Birokrasi secara Berkesinambungan	Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan dan Berkesinambungan 2016-2019	Adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan pemerintah Indonesia Peningkatan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan pemerintah Indonesia Peningkatan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan pemerintah Indonesia	Plt. Dirjen / Tim ID : Para. K/L Manager	

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
	3. Pengembangan nilai-nilai untuk meregalkan integritas (revolusi mental)	Peta pikir dan budaya kerja organisasi sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian			
	4. Sosialisasi / internalisasi kegiatan reformasi birokrasi	Laporan sosialisasi			
2. Anggaran Anggaran	1. Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	Pengadaban, pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi	Peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik	Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi	
	2. Pelaksanaan Program Pengembangan SDM	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan kompetensi dan kinerja SDM		
	3. Pelaksanaan Program Reformasi Sistem	Implementasi sistem informasi manajemen	Meningkatkan kualitas layanan publik		
	4. Pelaksanaan Program Reformasi Struktur Organisasi	Revisi struktur organisasi dan tata laksana	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas		

Program	Registan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
	5. Menegakkan disiplin kerja	Laporan hasil evaluasi atas kebijakan disiplin kerja	Terwujudnya integritas pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pemerintahan		
	6. Penerapan dan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Laporan hasil evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Menghilangkan praktik gratifikasi dalam pemerintahan		
	7. Peningkatan pelayanan publik	Kelembagaan pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik yang prima		
	8. Penerapan tata usaha dan kebijakan penanganan surat menyurat	Laporan hasil evaluasi atas kebijakan penanganan surat menyurat	Penerapan pelayanan surat menyurat		
	9. Peningkatan tata laksana	a. Peningkatan tata laksana b. Laporan dan evaluasi atas kebijakan tata laksana	Meningkatnya efisiensi dan produktivitas		

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
	10. Menetapkan kode etik	Laporan hasil evaluasi penerapan kode etik	Sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi pegawai sesuai Kode Etik yang berlaku		
3. Penguatan Sistem Kerja Timaj	1. Pemantauan pencapaian kinerja oleh para pejabat terdahulu	Penggunaan sistem informasi sistem pemantauan kinerja (SIP / MKP / MPT)	Meningkatnya kinerja dan kontribusi	Para Pejabat Terdahulu	
	2. Pengembangan atau manajemen kinerja aparatur	Siapa Mampu, Kita Beraksi dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi		Rita Farida, dkk	
	3. Penguatan sistem kerja (MPT) dan manajemen	a. Pengembangan sistem kerja terdahulu (MPT) (2014-2015) b. Evaluasi pelaksanaan sistem kerja terdahulu			
	4. Penguatan Sistem Kerja dan MPT (MPT) (2014-2015)	a. Laporan kinerja dan kontribusi (MPT) (2014-2015)			Agustus 2015 112 / 13 / 2015

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
		1. Sistematis LAKIP dan isi LAKIP / Laporan Kinerja lainnya telah sesuai ketentuan			LAKIP didukung data kinerja
	5. Pelaksanaan review internal atas penyusunan laporan keuangan Kementerian Kesehatan	review internal		asisten	
	3. Tidak ada pelanggaran ketentuan administrasi	kepastian administrasi	kepastian administrasi		
	4. Tidak ada pelanggaran ketentuan administrasi	kepastian administrasi	kepastian administrasi		
	5. Tidak ada pelanggaran ketentuan administrasi	kepastian administrasi	kepastian administrasi		

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
4. Penguatan Kelembagaan	1. Redefinisi visi, misi, strategi	Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan terhindarnya duplikasi tugas dan fungsi antar lembaga yang merupakan satu kesatuan	Tim AMP / Tim RB	Keputusan Menteri 2017 tentang Organisasi dan Tata Laga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	2. Reformasi kelembagaan	a. Fungsi dan peran kelembagaan b. Pelaksanaan tugas dan fungsi			
	3. Struktur kelembagaan	1. Jumlah keutuhan tugas, fungsi dan pelaksanaan organisasi			
				Dirjen Perencanaan	

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
	4. Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas	Sarana dan prasarana kantor yang berkualitas		Biro Umum	
5. Perataan Tata Laksana	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan Tata laksana (business process) yang menghasilkan SOP: <ol style="list-style-type: none"> Penyusunan peta proses Bisnis Menilik Eksekutif Keputusan, pelaksanaan, pelaksanaan SOP baru Melakukan kerja sama dengan instansi terkait sebagai pendukung pelaksanaan Penyusunan dan pelaksanaan SOP 	<ol style="list-style-type: none"> Peta Bisnis Proses SOP untuk pelaksanaan, sistem, sistem, laporan, laporan, pelaksanaan Keputusan 	<p>Terselenggaranya transparansi, akuntabilitas, dan standarisasi proses penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>Melaksanakan penggunaan Perundang-undangan yang berlaku</p>	Tim AMP / Tim BB	Koordinator: Biro Perencanaan

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
	a. Melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana serta aplikasi dan sistem informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan e-government	Rencana pengembangan e-government Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	manajemen pemerintahan		
	b. Pengembangan aplikasi baru	aplikasi baru yang relatif terbaru			Manajemen Perencanaan dan Statistik Biro Statistik Pusat Elektronik (BSP-E)
	c. Pengembangan alat ukur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)				
	d. Evaluasi Sistem Informasi dan Sistem Berbasis pada Basis data yang terintegrasi dan terdistribusi (ETD)	validasi			Evaluasi Sistem Informasi dan Sistem Berbasis pada Basis data yang terintegrasi dan terdistribusi (ETD)
	e. perancangan aplikasi baru	aplikasi baru			
	f. Evaluasi dan uji coba sistem informasi (SIS) dan sistem informasi (SIS)	laporan hasil uji coba sistem informasi (SIS) dan sistem informasi (SIS)			Evaluasi dan uji coba sistem informasi (SIS) dan sistem informasi (SIS)

	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
			Output	Outcome		
6.	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	1. Penyusunan Road Map Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Dokumen Road Map Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur	Tim AMP / Tim RB / Para KP Manager	Unit Kerja Pelaksana Biro Umum
		2. Evaluasi kebutuhan jabatan secara menyeluruh kebutuhan regional ASN	Susunan rencana jabatan dan kebutuhan regional ASN secara menyeluruh secara regional		Biro Umum	
		3. Analisis jabatan	Penyusunan rencana jabatan dan kebutuhan jabatan		Biro Personalia	
		4. Evaluasi beban kerja jabatan	Identifikasi jabatan yang kelebihan beban kerja dan kekurangan beban kerja serta penyesuaian beban kerja pegawai. Sementara itu, jabatan yang kelebihan beban kerja			
		5. Penemuan dan penciptaan jabatan pada indikator kinerja	Satukalpa yang lebih banyak dan lebih baik kualitasnya		Biro Umum	Sebelumnya 9, 10 dan 11, menjadi 5,55

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
	6. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi	Tersedianya peraturan terkait pelaksanaan rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi serta akuntabel			
	7. Pelaksanaan sistem merit				
	7.1. Pelaksanaan CASB				
	a. Seleksi terbuka selektif	Proses rekrutmen dan seleksi secara transparan, akurat, dan berbasis kompetensi	Dipadai BUM yang menerapkan kebijakan yang objektif, transparan, akuntabel		
	b. Seleksi tertutup selektif				
	c. Seleksi CASB				
	7.2. Seleksi terbuka CASB dengan UAS				
	a. Seleksi terbuka selektif	Terdapat prosedur rekrutmen dan seleksi yang objektif, akurat, dan berbasis kompetensi	Terdapat BUM yang menerapkan kebijakan yang objektif, transparan, akuntabel		

Program	Registan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
			2) Assessment Center		
	8. Perumusan dan penetapan kebijakan reward dan punishment untuk kinerja	Terdapatnya prosedur terkait kebijakan reward dan punishment untuk kinerja	Adanya informasi dan data yang akurat tentang prestasi kerja dan kinerja pegawai		
	9. Pelaksanaan sistem insentif dan hukuman yang adil dan objektif	Adanya prosedur dalam pelaksanaan pemberian insentif dan hukuman yang adil dan objektif	Adanya prosedur dalam pelaksanaan pemberian insentif dan hukuman yang adil dan objektif		
	10. Pelaksanaan sistem penilaian dan pengembangan karir	Adanya prosedur dalam pelaksanaan penilaian dan pengembangan karir	Adanya prosedur dalam pelaksanaan penilaian dan pengembangan karir		

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
	10. Memperkuat pola rotasi, mutasi, promosi	Terwujudnya rencana pola rotasi, mutasi dan promosi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan berbasis kompetensi	Terwujudnya pola rotasi, mutasi, promosi dan karir yang mendukung implementasi reformasi birokrasi		
	11. Memperkuat pola karir	Terwujudnya rencana pola karir sesuai dengan kebutuhan organisasi dan situasi lingkungan			
	12. Pelaksanaan program pengembangan sumber insani ASN melalui Sistem Manajemen Kompetensi (SMK)	Terwujudnya pelaksanaan program yang memenuhi standar	Berjalannya sistem informasi, sistem pengembangan kompetensi dan lain-lain		Berjalan dan paten sesuai dengan SMK
	13. Meningkatkan kinerja Pegawai	Terwujudnya terakreditasi Kinerja Pegawai	Peningkatan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan dengan diikutinya kemitraan, peningkatan kerja, dan prestasi		

Program	Registan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
	14. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) kepada Kementerian PAN dan RB	100% ASN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan LHKASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Transparansi dan akuntabilitas kepemilikan harta kekayaan ASN		
7. Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Membentuk dan melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja	a. Terlaksana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja b. Berkurangnya biaya operasional c. Berkurangnya biaya perjalanan dinas d. Berkurangnya biaya komunikasi dan informasi e. Berkurangnya biaya pemeliharaan kendaraan f. Berkurangnya biaya pembelian barang dan jasa g. Berkurangnya biaya pembelian aset tetap h. Berkurangnya biaya pembelian aset lancar i. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak lancar j. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak k. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak l. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak m. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak n. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak o. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak p. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak q. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak r. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak s. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak t. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak u. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak v. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak w. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak x. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak y. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak z. Berkurangnya biaya pembelian aset tidak bergerak	Terwujudnya pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	Keuangan, Kantor Staf Pusat, Kantor	
8. Kinerja dan Efektivitas Kerja	1. Efektivitas dan Kualitas Kerja 2. Efektivitas dan Kualitas Kerja	Meningkatkan kinerja organisasi dan meningkatkan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Keuangan, Kantor Staf Pusat, Kantor	Standar Kinerja dan Kualitas Kerja

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
	3. Peningkatan komunikasi publik	a. Strategi komunikasi terkait peningkatan kinerja organisasi b. Dokumen award / penghargaan yang diperoleh			
	4. Penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement)	https://www.lcp.go.id/			
	5. Penerapan inovasi dalam pelayanan publik	Inovasi layanan			Unit Kerja Pelaksana Layanan (Pengelola Inovasi Layanan)
	6. Tindak lanjut atas rekomendasi Ombudsman RI dan pelayanan publik	Laporan hasil tindak lanjut atas rekomendasi Ombudsman RI atas pelayanan publik			
	7. Penerapan Sistem Anggaran Berbasis Kinerja	01. Program Anggaran			

Program	Registan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
	8. Pengintegrasian sistem pengelolaan pengaduan masyarakat ke dalam aplikasi LAPOR	Terwujudnya kesatuan integrasi pengelolaan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik			
	9. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Laporan hasil pelaksanaan FGD / sosialisasi kebijakan di tingkat pemkot	Meningkatnya kualitas kebijakan di tingkat pemkot	Unit Kerja Pelaksana/ Deputi	
9. Program Pelaksanaan Kebijakan	1. Menyusun rencana kerja (RJK) PPK	Jumlah dokumen rencana kerja PPK	Mendeskripsikan rencana kebijakan yang dilaksanakan	Tim KPP/ Tim AD dan Unit Kerja Pelaksana PPK	
	2. Melakukan aksi PPK	Jumlah aksi PPK			
10. Program Pelaksanaan Kebijakan	1. Monitoring	Tersedianya laporan monitoring	Meningkatnya kinerja reformasi birokrasi	Tim KPP/ Tim AD	
	2. Evaluasi	Tersedianya laporan evaluasi			

Program	Registan	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab	Keterangan
		Output	Outcome		
	a. Menyusun laporan kinerja Tim Asistensi Manajemen Perubahan / Tim Reformasi Birokrasi	Tersedianya laporan kinerja tim urusan reformasi birokrasi termasuk manajemen perubahan			
	b. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Hasil PMPRB			

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
-19-011-2016/PERUB.1A,

13

SAUD HANIBITON

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
 RENCANA MENTERI BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016-2019

PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2016-2019

No	Program	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan Kegiatan Tahunan																																				Pemb. 2016 Mutaq.	Pemb. 2017
			2016												2017												2018													
1	Program 1	Kegiatan 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

No	Program	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan Kegiatan Tahunan																																				Pemb. 2016 Mutaq.	Pemb. 2017
			2016												2017												2018													
2	Program 2	Kegiatan 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

No	Program	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan Kegiatan Tahunan																																				Pemb. 2016 Mutaq.	Pemb. 2017
			2016												2017												2018													
3	Program 3	Kegiatan 3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

No.	Kategori	Kegiatan	Tercapai dan Tidak Tercapai																																				Keterangan
			2015												2016												2017												
1.	Kategori	Kegiatan 1	Tercapai												Tercapai												Tercapai												Keterangan
		Kegiatan 2	Tercapai												Tercapai												Tercapai												
		Kegiatan 3	Tercapai												Tercapai												Tercapai												

No.	Kategori	Kegiatan	Tercapai dan Tidak Tercapai																																				Keterangan
			2015												2016												2017												
2.	Kategori	Kegiatan 1	Tercapai												Tercapai												Tercapai												Keterangan
		Kegiatan 2	Tercapai												Tercapai												Tercapai												
		Kegiatan 3	Tercapai												Tercapai												Tercapai												

No.	Kategori	Kegiatan	Tercapai dan Tidak Tercapai																																				Keterangan
			2015												2016												2017												
3.	Kategori	Kegiatan 1	Tercapai												Tercapai												Tercapai												Keterangan
		Kegiatan 2	Tercapai												Tercapai												Tercapai												
		Kegiatan 3	Tercapai												Tercapai												Tercapai												

No	Program	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan Kegiatan												Pembina/Manajemen	Penanggung Jawab
			2014			2015			2016			2017				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik													Ditjen PPA Koridor 1	Kepala Ditjen PPA Koridor 1
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik														
		3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik														
		4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik														
		5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik														
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik													Ditjen PPA Koridor 1	Kepala Ditjen PPA Koridor 1
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik														
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik													Ditjen PPA Koridor 1	Kepala Ditjen PPA Koridor 1
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik														

No	Program	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan Kegiatan												Pembina/Manajemen	Penanggung Jawab
			2014			2015			2016			2017				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik													Ditjen PPA Koridor 1	Kepala Ditjen PPA Koridor 1
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik														

MEMBERI KOGNITIFOR BILANG PERFORMANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 RI
 TATUM HASHTON